



Rekonstruksi Hak Tanah Pasca Banjir Sumatra Butuh Refi



**karena di balik
setiap musibah
ada rahmat Allah ﷻ**
ACEH TIDAK SENDIRI, KAMI BERSAMA ANDA

www.gerindra.id

[@pd.satriaceh](https://www.instagram.com/pd.satriaceh)

[#WECARE](#) [#WEACT](#)

PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH PD SATRIA ACEH



NUSANTARA

Rekonstruksi Hak Tanah Pasc Sumatra Butuh Reforma Agra Terpadu



Prosedur administrasi perlu disederhanakan agar korban banjir tidak terjebak

f **ACEHTIMES.CO.ID | JAKARTA**– Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatra L
Sumatra Barat pada akhir 2025 tidak hanya menghancurkan permukiman dan
t infrastruktur, tetapi juga menghilangkan kepastian hak kepemilikan tanah ribu
wilayah terdampak.

p
Ketua Umum Pusat Kajian Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK-HASA), F
Aarce Tehupeiry, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan pasca bencana
berhenti pada bantuan darurat semata. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan
komprehensif yang mengintegrasikan reforma agraria, penataan ruang, serta
perlindungan lingkungan.

masyarakat atas tanah, serta edukasi dan insentif konservasi lingkungan,” ujar Tehupeiory melalui keterangan tertulis Senin (9/2/2026).

Aarce yang juga guru besar hukum agraria Universitas Kristen Indonesia (UKI) i menekankan bahwa rekonstruksi hak kepemilikan tanah harus diawali dengan regulasi khusus yang responsif terhadap kondisi pasca bencana.

“Prosedur administrasi perlu disederhanakan agar korban banjir tidak terjebak panjang, namun tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum. Hal ini penting mempercepat pemulihan hak atas tanah bagi masyarakat yang kehilangan buh kepemilikan,” jelasnya.

Tahap selanjutnya adalah pendataan dan pemetaan ulang secara terpadu di w terdampak. Pemerintah perlu mengintegrasikan data pertanahan, data kebenc data kependudukan, termasuk pemetaan ulang batas-batas lahan yang hilang banjir. Di saat yang sama, percepatan pemulihan layanan pertanahan menjadi agar masyarakat segera memperoleh kejelasan status hak mereka.

“Digitalisasi arsip dan dokumen pertanahan harus didorong sebagai langna i i risiko kehilangan data akibat bencana banjir di masa depan,” ungkapnya.

Menurutnya digitalisasi bukan hanya melindungi dokumen dari kerusakan fisik juga mempermudah akses dan proses verifikasi di kemudian hari. Pengalamar ini menjadi pelajaran penting, mengingat banyak arsip pertanahan fisik hilang arus banjir.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah da desa atau kelurahan, serta tokoh masyarakat. Peran mereka sangat menentukan proses verifikasi kepemilikan tanah dan mediasi sengketa yang kerap muncul p bencana. Tanpa keterlibatan aktif di tingkat lokal, rekonstruksi hak atas tanah l berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.

Pendekatan partisipatif menjadi elemen penting berikutnya. Rekonstruksi hak harus memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dan warga berpenghasilan rendah. Kebijakan pertanahan pa:

“Rekonstruksi hak kepemilikan tanah pasca bencana banjir di Sumatera dapat model penanganan banjir di Aceh sebagai pedoman dalam penanganan bencana serupa di wilayah lain di Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga

[Breaking News! Pilot dan Kopilot Smart Air Tewas Ditembak OTK di Bandara Korowai Bc](#)

[Kemlu: Prabowo Subianto Siap Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Bentukan Donald T](#)

[Wagub Fadhlullah Minta Iuran BPJS 500 Ribu Korban Bencana Ditanggung APBN](#)

[Didepan Pimpinan MPR RI Dalam Kunjungan ke Aceh, Fadhlullah Minta Jadup Cair Sebe Meugang](#)

Lebih lanjut, Aarce menegaskan bahwa rekonstruksi pertanahan tidak dapat d dari perencanaan tata ruang dan upaya mitigasi bencana. Pembangunan keml kawasan terdampak harus berorientasi pada keamanan, keberlanjutan, terhadap risiko banjir di masa depan. Wilayah rawan bencana tidak bole tanpa pertimbangan ekologis yang ketat. ^

Penerapan instrumen lingkungan juga menjadi sorotan penting. Analisis Meng Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan harus menjadi syarat mutlak pemberian Hak Guna Usaha. Selain itu, prinsip polluter pays serta sanksi tegas pelaku perusakan lingkungan perlu ditegakkan untuk mencegah terulangnya b akibat degradasi alam.

Pada tataran strategis, penataan ulang penguasaan dan penggunaan lahan ha agenda utama reforma agraria. Penguasaan lahan skala besar yang merusak li perlu dibatasi, sementara akses lahan bagi petani, nelayan, dan masyarakat ac diperkuat sesuai daya dukung ekologis.

Aspek ekologis turut menjadi perhatian serius. Pengelolaan lahan yang berkele perlindungan hutan lindung, serta penguatan kawasan resapan air harus dipei risiko banjir besar tidak kembali terulang.



Rekonstruksi Hak Tanah Pasca Banjir Sumatra Butuh Refi

Sumatera. Dengan pendekatan menyeluruh, pemulihan tidak hanya mengemb
kepemilikan tanah masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan sosial dan
yang lebih kuat di masa depan. **(AMD)**

RELATED TOPICS:

CLICK TO COMMENT



[HOME](#) [TENTANG KAMI](#) [REDAKSI](#) [PEDOMAN](#)

Copyright © 2016 Acehtimes.co.id